

## Pengelolaan Anggaran dan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Padang Sidempuan

Nadya Haryanti<sup>1</sup>, Susi Apriliani<sup>2</sup>

Jurusan Ekonomi Islam , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[nadyaharyanti63@gmail.com](mailto:nadyaharyanti63@gmail.com)<sup>1</sup> , [aprilianisusi33@gmail.com](mailto:aprilianisusi33@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to determine the Effectiveness of Financial Management in the Secretariat Office of the Padang Sidempuan District Representative Office which is carried out by the Administration and Secretariat Section of the Financial Management Subdivision regarding Financial Management Effectiveness which includes Budget Planning, Budget Implementation, Budget Reporting and Budgeting. This research uses the method of Financial Management. qualitative. The research informants consisted of the Secretary of the Regional House of Representatives, the Head of Administration and Secretariat, the Head of Sub-Planning and Finance, the Spending Treasurer, and the Planning and Finance Section Staff with a total of 5 informants, the data source consisted of primary and secondary data obtained from collection techniques. data by observing, interviewing, and documenting. The results of the study show that the effectiveness of financial management at the Secretariat of the Regional Representative Council of Padang Sidempuan Regency is quite good and systematic. improvement of facilities and infrastructure so that tasks can be achieved.*

**Keywords:** *analysis, effectiveness, management, finance, budget*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kantor Sekretariat Perwakilan Kabupaten Padang Sidempuan yang dilakukan oleh Bagian Tata Usaha dan Kesekretariatan Sub Bagian Pengelolaan Keuangan tentang Efektivitas Pengelolaan Keuangan yang meliputi Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Anggaran dan Penganggaran. Penelitian ini menggunakan metode Manajemen Keuangan. kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Tata Usaha dan Sekretariat, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan jumlah informan sebanyak 5 orang, data sumber yang terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari teknik pengumpulan. data dengan cara mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Sidempuan cukup baik dan sistematis. peningkatan sarana dan prasarana agar tugas dapat tercapai.

**Kata kunci:** *analisis, efektivitas, manajemen, keuangan, anggaran*

### PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang mengenai Keuangan Negara, terdapat Penegasan dibidang Pengelolaan Keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan

Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan Pengawasan. Pelaporan keuangan Sekretariat DPRD sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Keuangan daerah merupakan suatu hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Olehnya itu OPD Sekeretariat DPRD Kabupaten/Kota sebagai pengguna, pengelola sekaligus penerima dana masyarakat dapat dijalankan sebaik mungkin dan memenuhi harapan Negara dan masyarakat. Terkait dengan pokok masalah adalah pengelolaan administrasi bahwa pengelolaan administrasi keuangan oleh bendahara atau pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang diberikan kewenangan oleh pejabat di atasnya dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah masih menimbulkan berbagai masalah di lapangan terkait dengan pengendalian pelaksanaan kegiatan yakni proses penerimaan dan pengeluaran.<sup>1</sup>

Administrasi pelaporan perkembangan kegiatan serta administrasi penyediaan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan termasuk unsur penyelesaian administrasi seperti surat perjanjian kerja khususnya pengelolaannya dilakukan secara professional dalam proses pertanggungjawaban masih ditemukan kendala-kendala keruwetan dan kemacetan penyelesaiannya di antaranya Komptensi dalam efektifitas pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah oleh Sekretariat Daerah Masih Lemah, Prosedur Tata Kerja Laporan pertanggungjawaban belum maksimal. adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah Pemenrintah Daerah senantiasa meningkatkan SDM aparatur dengan mengikutkan dalam pelatuhan Diklat atau Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan, Kepala PD dalam Hal ini Sekertaris DPRD Padang Sidimpuan selaku Pengguna Anggaran meminta kepada PPTK untuk segera mengajukan bukti pertanggungjawaban keuangan sesuai penanggungjawab teknis kegiatan.

Berangkat dari sistem dan aturan pengelolaan administrasi, maka berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan di lapangan bahwa kemacetan pengelolaan administrasi keuangan disebabkan adalah kesalahan persepsi, system dan prosedur pengelolaannya, aparat belum dapat memahami secara jelas mekanisme pengelolaannya dengan baik, dan berakibat pada nilai akuntabel penerimaan dan pengeluaran masih dijumpai adanya kelemahan-kelemahan,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

sehingga penataan dan pengelolaannya sering mengalami kemacetan secara administrasi terutama dalam penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah khususnya pada Sekretariat DPRD Kota Padang Sidempuan. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti tentang “Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan”.<sup>2</sup>

## **LANDASAN TEORI**

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang (value for money) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan Daerah yang akan diimplementasikan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) seperti halnya dalam peningkatan peran serta bendahara dalam Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pelaporan keuangan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5, keuangan daerah adalah: “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>2</sup> Sugiono. (2001). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

<sup>3</sup> Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang memberikan gambaran mengenai obyek yang diamati atau fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah Efektifitas Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan yang mengkhusus pada efektifitas pengelolaan keuangan dengan indicator Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban. sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari tehnik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Deskripsi Pengelolaan Keuangan**

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan Sekretariat Daerah yang akan diimplementasikan melalui organisasi perangkat daerah seperti halnya pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan kata lain pengelolaan keuangan daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas horizontal) secara transparan. Anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usul dan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari pelaporan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dan pertanggungjawaban DPRD berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pengenal system pertanggungjawaban anggaran DPRD tersebut

merupakan konsekuensi logis dari penggunaan anggaran (keuangan).<sup>4</sup>

## 2. Efektifitas Pengelolaan Keuangan

Anggaran sebagai perencanaan dan perwujudan pengelolaan keuangan daerah merupakan alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai instrument kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka pencapaian tujuan.

Perencanaan anggaran merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai beserta dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan pada suatu tahun anggaran. Perencanaan anggaran sangat dibutuhkan sebagai suatu langkah atau tindakan dalam rangka pengelolaan anggaran, oleh sebab itu pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Padang Sidempuan perlu mendapat perhatian sehingga anggaran yang digunakan sesuai aturan. Hasil penelitian ini, menjelaskan kepada kita bahwa efektifitas pengelolaan keuangan dijalankan berdasarkan petunjuk teknis dan tata aturan pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana APBD untuk dikelola dengan membiayai program dan kegiatan yang sifatnya fisik dan non fisik sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, terkait dengan pengelolaan keuangannya sudah dapat direncanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini menurut penulis dapat dinyatakan berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang disini adalah Sekretaris DPRD untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan keuangan daerah pasal 122 ayat (5) disebutkan bahwa "jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. aturan peraturan yang berlaku."<sup>5</sup>

Hasil penelitian ini, menjelaskan kepada kita bahwa peran dan fungsi pegawai dengan segala aktivitas dan bidang tanggungjawab yang pada intinya telah dilakukan suatu pelaksanaan keuangan dari semua program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Pimpinan telah mampu mengorganisasikan suatu pengembangan kerja dalam pengelolaan keuangan secara administrasi dengan kualitas pekerjaan yang telah dicapai, dan ini sudah berjalan dengan baik.

---

<sup>4</sup> Halim. Abdul. (2007). *Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*. STIM YKPN Yogyakarta, hal. 24

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengenai pelaporan keuangan adalah suatu laporan keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan yang memuat secara aktivitas yang terkait dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Pelaporan keuangan yang dibuat sesuai dengan apa yang terealisasi pada bulan tersebut harus dibuatkan Laporan yang disebut Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) yang terdiri dari Buku Kas Umum, Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak, dan harus disetor di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah setiap tanggal 10 bulan berjalan. pengelolaan setiap anggaran di Sekretariat DPRD Kota Padang Sidempuan, berdasarkan pada perencanaan anggaran di awal tahun anggaran, maka pelaporan keuangan dibuat secara terperinci berdasarkan penerimaan dan pengeluaran keuangan. Anggaran yang dikelola oleh Staf Sekretariat DPRD Kota Padang Sidempuan adalah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, pelaporan keuangan yang dibelanjakan dibuat secara terperinci berdasarkan penerimaan dan pengeluaran keuangan. Dari hasil wawancara dengan informan tersebut diatas terkait dengan pelaporan, secara umum dapat dikatakan bahwa pelaporan keuangan dibuat secara terperinci dengan berpedoman pada penerimaan dan pengeluaran bahwa pelaporan tersebut terlebih dahulu di evaluasi oleh Sekretaris DPRD Kota Padang Sidempuan.

Setelah adanya pelaporan maka adanya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan tahap paling penting dari penggunaan anggaran karena pada tahap ini dapat diketahui tingkat keberhasilan dan tercapai tidaknya seluruh program yang telah direncanakan. Pertanggungjawaban keuangan adalah suatu dokumen tertulis yang disesuaikan dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan keuangan dalam waktu tertentu yang berisi tentang semua hal-hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Beberapa aspek pelaksanaan yang perlu diperhatikan adalah pemberian peran dan tanggungjawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, system pengawasan pengeluaran dan system pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang Milik Daerah, Larangan penyitaan Uang dan Barang Milik Daaerah dan/atau Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan ke dalam register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU dan SPP-LS.<sup>6</sup>

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia atas pelaksanaan program kerja organisasi, maka hal terpenting yang harus dimiliki dan diterapkan oleh Pimpinan adalah pengawasan, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal lingkup organisasi. Pengawasan ini penting untuk memberikan suatu

---

<sup>6</sup> Siagian, Sondang P. (1994). *Patologi Birokrasi-Analisis, Identifikasi dan Terapannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 35

bahan evaluasi dan pembinaan pegawai untuk lebih mengembangkan kualitas kerjanya, tentunya memerlukan suatu strategi yang baik terutama pada tatanan pelaksanaan pengelolaan keuangan. Mekanisme pengelolaannya membutuhkan upaya pengendalian dalam bentuk pengawasan karena dari sisi penerimaannya, pengeluarannya serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangannya membutuhkan pengawasan yang ketat.<sup>7</sup> Hasil Penelitian ini, menjelaskan kepada kita bahwa peran dan fungsi pegawai dengan segala aktivitas dan bidang tanggungjawabnya memerlukan suatu pengawasan yang baik, yang pada intinya telah dilakukan suatu pelaksanaan kegiatan dari semua bagianbagian yang membutuhkan dan mengeluarkan anggaran pelaksanaannya, hal ini guna emastikan pengelolaan tersebut sudah dijalankan berdasarkan ketentuan yang ada terutama sinergitas antara anggaran yang digunakan dengan fakta fisik di lapangan serta kesesuaian yang telah direncanakan sebelumnya, hal ini memerlukan suatu kontrol dengan maksud untuk menunjukkan arah yang tepat pada tataran pelaksanaan dan penyelesaian suatu kegiatan, serta diperlukan kesiapan sumber daya manusianya untu menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kepada PD telah mampu melaksanakan suatu pengawasan dan menggerakkan pegawai untuk berbuat sebagai pengembangan kinerja dengan kualitas pekerjaan yang telah dicapai dan ini sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan kendala yang di hadapi serta upaya yang telah di lakukan pelaksanaan keuangan dalam efektifitas pengelolaan keuangan ini dapat dikatakan berjalan dengan baik karena dilihat dari persentase keberhasilan program dan kegiatan pada PD Sekretariat DPRD Kota Padang Sidimpuan ini mencapai 94,17% angka yang tinggi.

Dari persentase tersebut dapat dilihat bahwa kritiria efisien dan efektif sudah berjalan dengan baik. Laporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap paling penting dari penggunaan anggaran karena tahap ini dapat diketahui tingkat keberhasilan, dan tercapai tidaknya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah berupa catatan-catatan pelaksanaan anggaran.

Terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Padang Sidimpuan dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik, karena berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan pengamatan langsung, dimana hal ini efektifitas pengelola keuangan yang ada di Sekretariat

---

<sup>7</sup> Ismail, Imran. (2017). Kemitraan Pembangunan Daerah (Kajian Implementasi Kemitraan Pengelolaan Pembangunan Daerah Era Kepemimpinan Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, M.M). Jakarta: Indomedia, hal. 5

DPRD Kota Padang Sidempuan menata dan mengadministrasikan dokumen pertanggungjawaban keuangan dengan rapih dan setiap tahun dijilid dengan warna sampul yang berbeda sehingga memudahkan untuk mengetahui dokumen tersebut adalah pertanggungjawaban pada tahun sekian. Begitu pula dengan efektifitas pengawasan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Padang Sidempuan dapat dikatakan berjalan dengan baik serta terlaksana dengan mengacu pada kebijakan dan sasaran, tujuan PD, dimana sasaran ini telah diatur dan disusun pola pelaksanaannya dengan menyesuaikan dengan bidang kegiatan yang menjadi tanggungjawab yang dimiliki oleh pegawai sesuai dengan strategi pencapaian tujuan tersebut. Oleh sebab itu efektifitas pengelolaan keuangan telah diawasi secara teknis dan administrasi oleh unsur Pimpinan dalam hal ini kepala PD yaitu Sekretaris DPRD Kota Padang Sidempuan untuk memastikan terselenggaranya suatu program dan memberi arahan dan bimbingan dalam upaya memastikan tidak terjadi kesalahan-kesalahan fatal terkait dengan pengelolaan keuangan tersebut. Dengan peran dan fungsinya sebagai pelaksana program kerja nilai akuntabilitas dikedepankan atas upaya pengendalian keuangan yang dimulai dari penerimaan, pencatatan, realisasi sampai pada pelaporannya secara administrasi serta implementasinya telah diawasi sekaligus dikendalikan sebagai bahan evaluasi atas kinerja pegawai.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis menyimpulkan :

Efektifitas dalam keteraturan pengelolaan keuangan, pegawai Sekretariat DPRD Kota Padang Sidempuan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dijalankan dengan baik, dalam hal ini telah diperkuat bahwa adanya perencanaan yang kuat dari sistem kebijakan Pimpinan bersama bagian-bagian lainnya untuk mengkoordinasikan rangkaian kerja dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD untuk membiayai program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Padang Sidempuan dengan dasar dan ketentuan yang berlaku. faktor-faktor yang menghambat serta upaya pemecahan efektifitas pengelolaan keuangan, kompetensi pengelola keuangan belum efektif dalam memenuhi tugas yang lebih baik, Namun demikian proses ini telah diupayakan dengan pengembangan pegawai melalui diklat atau bimbingan teknis sehingga efektifitas pengelolaan keuangan berjalan sangat baik.

## **DAFTAR REFERENSI**

Halim. Abdul. (2007). *Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*. STIM YKPN Yogyakarta

# **As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal**

Volume 2 Nomor 2 (2023) 135-143 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v2i2.29

- Ismail, Imran. (2017). Kemitraan Pembangunan Daerah (Kajian Implementasi Kemitraan Pengelolaan Pembangunan Daerah Era Kepemimpinan Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, M.M). Jakarta: Indomedia
- Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Siagian, Sondang P. (1994). Patologi Birokrasi-Analisis, Identifikasi dan Terapannya, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugiono. (2001). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara